



Banyak yang Lebih Miskin dari Saya

■ 62 Keluarga Mantap Menolak Bantuan KMS

Ya, begini kondisi rumah saya. Ini hanya rumah dari orangtua yang kemudian kami tinggali. Seharusnya, kami layak mendapat KMS, namun kami tidak mau lagi menerima.

YOGYA, TRIBUN - Mata Ngatinah (48) berkaca-kaca saat menceritakan keenganan dirinya didata kembali sebagai penerima kartu menuju sejahtera (KMS) di tahun 2018. Hatinya lega dan tenang setelah bisa melepas bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tersebut.

"Banyak yang mengatakan *eman-eman* (sayang). Tapi hati nurani saya tetap ingin melepaskan untuk yang lebih membutuhkan," kata warga Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta ini kepada *Tribun Jogja*, Rabu (7/3).

Ngatinah dan suaminya, Eriyanto (55) sudah hampir lima tahun terakhir ini menjadi penerima KMS.

Uang dari bantuan pemerintah ini se-

lalu dipergunakan untuk menyekolahkan dua anaknya hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Uang yang diterimanya cukup signifikan meringankan beban hidupnya yang mengalami pasang surut. Sebelumnya, penghasilan keluarga ini jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Yogya. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari pun mereka pas-pasan.

Pasangan ini tinggal di rumah sederhana. Berada di gang sempit kawasan Malloboro yang masih terkesan kumuh. Rumah bercat biru ini cukup kecil karena hanya berukuran 60 meter persegi dan ditinggali dua kepala keluarga (KK) sekaligus.

● ke halaman 11

Banyak yang Lebih Miskin

• Sambungan Hal 1

Di sudut-sudut rumahnya pun terlihat kurang tertata rapi. Kucing peliharaan dibelakan berada di ruang tamu yang terbatas ukurannya. Alhasil, bau kotoran dari kucing ini menusuk hidung setiap orang yang hendak bertamu.

"Ya, begini kondisi rumah saya. Ini hanya rumah dari orangtua yang kemudian kami tinggali. Seharusnya, kami layak mendapat KMS, namun kami tidak mau lagi menerima," kata Ngatinah.

Ngatinah dan suaminya merupakan satu di antara 62 KK yang enggan didata untuk menerima KMS. Mereka mundur dari pendataan KMS pada tahun 2017 silam karena mereka ingin berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Padahal, di sisi lain, masih banyak warga yang sebenarnya lebih mampu namun berupaya memiskinkan diri agar memperoleh bantuan-bantuan serupa.

Hati tergerak

Alasan mereka untuk tidak mau didata dalam KMS lebih kuat karena dua anaknya sudah menyelesaikan pendidikan tingkat atas. Selain tidak lagi terbebani biaya pendidikan, penghasilan mereka sebagai pedagang sandal eceran di gang sempit Sosrowijayan tampak semakin membaik.

Keputusan untuk melepas kesempatan mendapatkan KMS yang mungkin saja bisa mereka peroleh untuk

kemudahan mengakses kesehatan, mendapat santunan kematian dan semako gratis pun sudah bulat. Kondisi warga lain yang ada di sekitar mereka membuat hati mereka tergerak untuk berbagi.

"Ada rasa di mana kami tidak enak untuk menerima bantuan ini. Selain semua anak sudah selesai sekolah, kami melihat masih banyak warga yang membutuhkan daripada kami," ucap Ngatinah diamini suaminya Eriyanto.

Eriyanto pun menambahkan, kerelaan melepas KMS dengan menolak pendataan dari petugas ini tak lepas dari latar belakangnya pengalaman mereka memperoleh bantuan ini. Saat pertama kali memperoleh, ia mengaku kesulitan untuk memperoleh KMS dan harus mengajukan beberapa kali.

"Nah, kami sadar betul jika ada warga benar-benar membutuhkan dan kesusahannya, setidaknya dengan kami melepas ini mereka bisa mendapat kesempatan," ujar Eriyanto yang mengaku sempat bekerja sebagai operator di salah satu SPBU Yogyakarta ini.

Indahnya berbagi

Dia pun mengajak warga yang cukup dalam finansial dan mampu dalam membayar kebutuhan hidup untuk tidak terlalu naif dalam mencari bantuan. Sebaliknya, dengan memberikan kesempatan pada orang yang lebih berhak, rezeki banyak pun menjadi keniscayaan. "Berbagi itu indah dan jujur pada kondisi diri," ujarnya.

Setali tiga uang dengan kondisi Sri Ngatinah (49), war-

ga Jalan Rotowijayan, Kadipaten, Kraton yang akhirnya memilih untuk tidak lagi menerima KMS. Keputusannya itu tak lain karena dua anaknya juga sudah lulus sekolah.

Baginya, KMS tak ubahnya penyelamat hidup dari himpitan ekonomi pada saat menyekolahkan kedua putrinya. Apalagi, dua putrinya itu hanya terpaat satu tahun sehingga terasa berat untuk biaya sekolah.

"Selama hampir 12 tahun saya mempergunakan KMS untuk kepentingan sekolah. Meskipun, ada beberapa bantuan yang bisa saya gunakan," katanya.

Lulus sekolah

Namun, begitu dua putrinya lulus dari SMA dan SMK, Sri Ngatinah dan suaminya memutuskan untuk tidak lagi menerima KMS. Pendataan dari petugas pun akhirnya tidak lagi diterimanya. Keputusannya untuk tidak lagi menerima manfaat KMS sudah dipikirkannya masak-masak. Apalagi, anak terakhirnya juga meminta dirinya untuk tidak lagi menggunakan KMS.

Selain itu, Sri Ngatinah juga tidak mau lagi terlalu tergantung dengan program bantuan pemerintah. Embel-embel kurang mampu pun membuatnya cukup sadar dengan kondisi diri. Menurutnya, tidak selamanya orang juga senang jika masih dianggap kurang mampu dan hanya menggantungkan diri dari APBD.

"Saya rasa KMS ini masih banyak yang lebih membutuhkan daripada saya. Apalagi, jika untuk menyekolahkan anak," katanya. (ais/sis)

Rela Disebut Miskin Demi KMS

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta mengapresiasi 62 kepala keluarga yang bertahun-tahun menerima Kartu Menuju Sehat (KMS) dan saat ini sudah enggan lagi untuk didata. Dengan demikian, diharapkan kesempatan KMS yang tidak lagi diambil oleh puluhan KK tersebut bisa digunakan untuk yang lebih membutuhkan.

Meski demikian, selain 62 KK yang mengembalikan KMS ini, diyakini banyak warga yang tetap ingin dianggap miskin agar terus memperoleh bantu-

an. Beberapa warga yang sebenarnya sudah mampu dan tetap menerima KMS sebenarnya sudah miskin sejak dalam pikiran.

"Kami tentu mengapresiasi kejujuran dari mereka yang sudah enggan lagi didata. Namun, kami juga berharap ada yang mau mengembalikan (KMS) jika memang sudah tidak lagi membutuhkan," kata Kepala Bidang (Kabid) Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Esti Setyarsi kepada *Tribun Jogja*, Kamis (8/3).

● ke halaman 11

Rela Disebut Miskin Demi

● Sambungan Hal 1

Menurutnya, selama belasan tahun sejak KMS diluncurkan, baru ada satu orang yang jujur dan mengembalikan uang bantuan dari APBD Kota Yogyakarta ini. Sementara, baru pada tahun 2017, ada 62 KK yang tidak mau didata sebagai penerima KMS.

Fungsi KMS

Jika menilik dari fungsi pemberian KMS, kata Esti, adalah sebuah identitas keluarga dan anggota yang terdaftar di dalamnya adalah penduduk jaminan perlindungan sosial. KMS diterbitkan berdasarkan data penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial hasil pendataan yang memenuhi kriteria. Dalam hal ini, Dinsos setempat menggunakan parameter pendataan yang mengalami revisi selama dua kali dalam kurun waktu 2009 dan 2012.

Beberapa parameter yang dimaksud, diantaranya ada-

lah kepemilikan aset tidak lebih dari Rp1,8 juta, penghasilan setiap bulan antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu, tagihan listrik per bulan kurang dari Rp50 ribu, rumah bukan milik sendiri.

Luas tempat tinggal rata-rata dari lima meter persegi, jenis bahan dinding bidang terluas dari tempat tinggal berupa bambu, kayu atau bahan lain yang berkualitas rendah. Untuk segi pangan, anggota keluarga tidak mampu memberi makan anggotanya 3 kali sehari, juga tidak bisa menyediakan lauk atau susu dua kali seminggu. Serta kriteria kesehatan dan sandang.

"Untuk kriteria yang berbeda di tahun 2009 adalah batasan pendapatannya yang berkisar Rp200 ribu," paparnya.

Jumlah penerima

"Adapun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, jumlah penerima KMS mengalami penurunan. Hal ini, kata dia, disebabkan banyak warga yang sudah dipandang mampu dan tidak lagi berhak mendapat bantuan dari anggaran daerah.

Untuk tahun 2013, jumlah penerima KMS mencapai 20.481 KK, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 18.881 KK penerima KMS, tahun 2015 ada 18.730 KK penerima KMS, 2016 ada 18.651 KK penerima KMS, dan tahun 2017 ada 17.253 KK penerima KMS.

Para penerima ini, sebut Esti sudah digolongkan menjadi tiga kelompok yakni KMS 1 untuk fakir miskin, KMS 2 untuk miskin, dan KMS 3 untuk rentan miskin. Penurunan jumlah penerima KMS ini menurun karena beberapa faktor, di antaranya berdasarkan hasil verifikasi di lapangan yang dilakukan secara berjenjang.

Dia mencontohkan, pada tahun 2017 ada usulan penerima sebanyak 23.246 KK, dari jumlah tersebut terverifikasi ada 5.137 KK yang tidak layak mendapatkan KMS. Dari jumlah tersebut didapatkan hasil akhir ada 17.253 KK penerima KMS.

"Misalnya, dari hasil verifikasi ada data dobel, pindah domisili, ataupun tidak tepat sasaran, maka akan kami coret,"

paparnya.

Verifikasi

Adapun tahap verifikasi data diawali pada bulan Maret-April, dari sosialisasi pada RT atau RW mengenai usulan penerima KMS, dilanjutkan dengan konfirmasi data keluarga sasaran dan merekrut petugas pendata yang terdiri dari empat orang setiap kelurahan.

Kemudian, pada bulan Mei, akan ada uji publik pertama pendatang RT/RW, pada bulan Juni akan ada pelatihan calon petugas pendata. Baru pada bulan Juli hingga Agustus ada pendataan *by name by address*. Verifikasi lapangan masuk dan olah data. Kemudian, pada bulan Oktober terdapat pengolahan data dan progresnya setiap minggu akan diolah.

Hasil pengolahan data ini, kemudian akan diuji publik 2 pada bulan november. Di dalam uji publik ini ada verifikasi ulang pada data yang diolah. Jika tidak ada masukan atau sudah legkap, maka pada awal Desember verifikasi lapangan dan data ditetapkan melalui surat keputusan Wali Kota. (als/sls)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005